

**PERANAN WALI NAGARI DALAM PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DI NAGARI SUNGAI AUA  
KECAMATAN SUNGAI AUR KABUPATEN  
PASAMAN BARAT**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**DIAN HADANA PUTRA  
178510017**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

**PERANAN WALI NAGARI DALAM PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DI NAGARI SUNGAI AUA KECAMATAN SUNGAI  
AUR KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan  
Politik Universitas Medan Area



**OLEH:**

**DIAN HADANA PUTRA**

**178510017**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2022**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Peranan Wali Nagari Dalam Pembangunan Infrastruktur di Nagari  
Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat

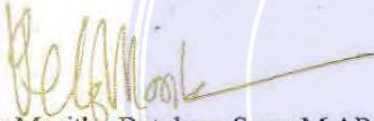
Nama Mahasiswa : Dian Hadana Putra


NPM : 178510017

Program Svtbudi : Ilmu Pemerintahan

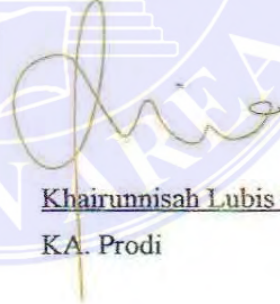
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh:  
Komisi Pembimbing

  
Beby Masitho Batubara S.sos.M.AP  
Pembimbing I

  
Evi Yunita Kurniaty S.sos.M.IP  
Pembimbing II

  
Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si  
Dekan

  
Khairunnisah Lubis S.sos.M.IP  
KA. Prodi

Tanggal Lulus: 14 Februari 2022

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan Bahwa Skripsi yang saya susun, Sebagai Syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian - bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah , dan etika penulisan ilmiah , Saya Bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi - sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat Skripsi.



Medan , 14 Februari 2022

DianHadana Putra

178510017

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai aktivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dian Hadana Putra  
NPM : 178510017  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik  
Jenis Karya : Skripsi

Demi Pengembangan ilmu Pengetahuan , memyetujui untuk memberikan kepada universitas Medan Area **Hak bebas Royalti Noneklusif ( Non *execlusif* Royalty – free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : “ **Peranan Wali Nagari Dalam Pembangunan Infrastruktur di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat** ” beserta perangkat yang ada ( jika diperlukan) Dengan hak bebas Royalti Nonesklusifini Universitas Medan Area bentukmenyimpan, mengalihmedia/format- kan,mengelola dalam bentuk pangkalan data ( database), merawat , dan membulikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan namasaya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak cipta .

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat dimedan  
Pada tanggal: 14 Februari 2022  
Yang Menyatakan

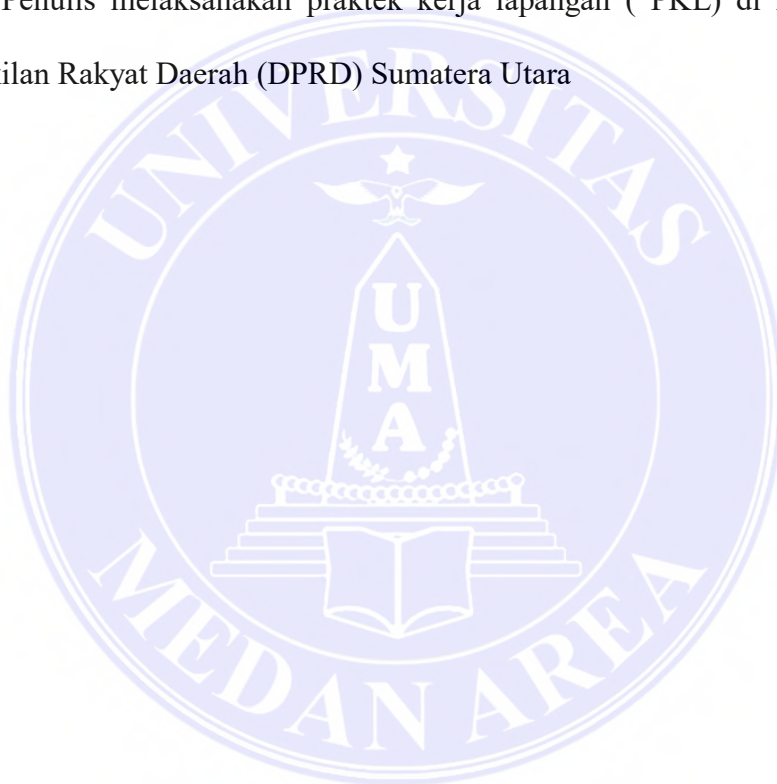


Dian Hadana Putra  
178510017

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Ujung Gading Pada tanggal 15 Februari 1999 dari ayah Alm. Arpan S.Pd dan ibu Yuliwarni Amd.Keb. Penulis merupakan putra ke 3 dari 3 bersaudara Tahun 2017 Penulis lulus dari SMA Negeri 1 Lembah Melintang dan Pada tahun 2017 Terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu sosial dan Politik Universitas Medan Area.

Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan ( PKL) di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara



## ABSTRAK

### PERANAN WALI NAGARI DALAM PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI NAGARI SUNGAI AUA KECAMATAN SUNGAI AUR KABUPATEN PASAMAN BARAT

Pemerintahan Nagari adalah wujud otonomi daerah, yang merupakan pemerintahan terendah sebagai pengganti pemerintahan desa yang dipimpin oleh Wali Nagari. Pemerintahan Nagari merupakan sebuah sistem yang sangat otonom dan tumbuh berakar di negeri ini. Dan telah memberi warna tersendiri terhadap pembentukan watak dan karakter masyarakat minangkabau. Di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan ke kebun, jalan ke Nagari namun pelaksanaannya belum maksimal, terkesan lambat dan kurang merata dalam pelaksanaannya. Peranan Wali Nagari sampai saat ini di rasakan masih kurang, hal ini berkaitan erat dengan kemampuan Wali Nagari dalam penyelenggaraan Wali Nagari yang dianggap masih kurang adanya kerjasama antar aparat pemerintah terlebih antara aparat dengan masyarakat Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui peranan Wali Nagari dalam pemerataan pembangunan infrastruktur di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif melalui teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Wali Nagari dalam pembangunan infrastruktur di Nagari Sungai Aua sudah cukup optimal, hal ini dapat dilihat berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri no 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa terdapat 3 indikator sebagai pengukur pelaksanaan pembangunan yakni perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teori Kozair (dalam Sitorus, 2006:134) tentang peranan untuk membahas peranan Wali Nagari Sungai Aua. faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan nagari tentunya adalah partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang membangkitkan emosi dan ikut serta dalam kegiatan organisasi ataupun proses pembangunan di Nagari.

**Kata kunci : peranan, Wali Nagari, pembangunan infrastruktur**

## ABSTRACT

### THE ROLE OF WALI NAGARI IN EQUALITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN NAGARI SUNGAI AUA SUNGAI AUR DISTRICT, PASAMAN BARAT REGENCY

Nagari government is a form of regional autonomy, which is the lowest government in place of village government led by Wali Nagari. The Nagari government is a highly autonomous system and is rooted in this country. And has given its own color to the formation of the character and character of the Minangkabau community. In Nagari Sungai Aua, Sungai Aur District, West Pasaman Regency, infrastructure development such as the construction of roads to gardens, roads to Nagari, but the implementation has not been maximized, seems slow and uneven in implementation. The role of Wali Nagari so far is felt to be lacking, this is closely related to the ability of Wali Nagari in organizing Wali Nagari which is considered to be lacking in cooperation between government officials, especially between the apparatus and the community. The purpose of this study is to determine the role of Wali Nagari in equitable development. infrastructure in Nagari Sungai Aua, Sungai Aur Sub-district, West Pasaman Regency. Methods This research uses descriptive qualitative research methods through interviews, observation, and documentation. The results showed that the role of Wali Nagari in infrastructure development in Nagari Sungai Aua was quite optimal, this can be seen based on the regulation of the Minister of Home Affairs No. 114 of 2014 concerning village development guidelines, there are 3 indicators as a measure of development implementation, namely planning, implementation, supervision and monitoring. . In this study the author also uses Kozair's theory (in Sitorus, 2006:134) about the role to discuss the role of Wali Nagari Sungai Aua. A supporting factor in the implementation of Nagari development, of course, is that community participation can be interpreted as an activity that arouses emotions and participates in organizational activities or development processes in Nagari.

**Keywords: role, Wali Nagari, infrastructure development**



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya dan sholawat berangkaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan, dengan judul Peranan Wali Nagari Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak kesulitan dan keterbatasan kemampuan penulis. Namun dengan tekad dan kemauan yang kuat penulis serta bantuan dari berbagai pihak untuk selesainya skripsi ini. Maka untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak tersebut. Terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Dr. Effiaty Juliana M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
3. Ibu Beby Mashito Batubara S.Sos, M.AP selaku dosen pembimbing 1 saya yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini
4. Ibu Evi Yunita Kurniaty S.Sos M.IP selaku dosen pembimbing 2 saya yang telah meluangkan waktu dan pikirannya serta membimbing penulis sampai selesai skripsi ini

5. Ibu Evi Yunita Kurniaty S.Sos M.IP selaku Ketua Prodi Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan persetujuan awal pada skripsi ini
  6. Ibu Riri Rezeki Hariani S.Sos, MAP selaku Sekretaris Pembimbing saya yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini
  7. Para staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi serta memberikan perkembangan informasi
  8. Teristimewa kepada Ibu yang sudah memberikan kasih dan sayang kepada penulis mulai dari kecil sampai sekarang. Almarhum Ayah, beserta kakak yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi
  9. Kepada teman-teman saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah menemani juga membantu dalam penyelesaian skripsi ini
- Penulis sangat menghargai setiap masukan dan kritikan untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini, kritikan yang membangun merupakan penambahan wawasan berpikir penulis untuk meneruskan khasanah pemikiran dalam tulisan selanjutnya. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat.

Penulis

Dian Hadana Putra

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Masalah .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
BAB II LANDASAN TEORI .....	7
2.1 Pengertian Peranan .....	7
2.2 Wali Nagari .....	8
2.3 Pembangunan .....	11
2.3.1 Program Pembangunan .....	12
2.3.2 Tujuan dan Sasaran Perencanaan Pembangunan .....	13
2.3.3 Jenis Perencanaan Pembangunan .....	14
2.3.4 Strategi Pembangunan Daerah .....	15
2.3.5 Partisipasi Dalam Pembangunan Pedesaan .....	16
2.4 Infrastruktur .....	17
2.4.1 Sistem Infrastruktur .....	18
2.4.2 Perancangan Sistem Infrastruktur .....	19
2.4.3 Krisis Infrastruktur .....	20
2.5 Penelitian Terdahulu .....	20
2.6 Kerangka Berpikir .....	22
BAB III METODE PENELITIAN .....	25
3.1 Jenis Penelitian .....	25
3.2 Lokasi Penelitian .....	25
3.3 Waktu Penelitian .....	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	26
3.5 Informan Penelitian .....	28
3.6 Analisis Data .....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	33

4.1 Hasil Penelitian .....	33
4.1.1 Deskripsi Nagari Sungai Aua .....	33
4.1.2 Visi – Misi Nagari Sungai Aua .....	40
4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Sungai Aua .....	42
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Nagari .....	43
4.2 Pembahasan .....	43
4.2.1 Pembangunan Nagari .....	43
4.2.2 Peranan Wali Nagari Dalam Pembangunan Infrastruktur di Nagari ..	46
4.2.3 Faktor Pendukung dan Infrastruktur di Nagari Sungai Aua .....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	55
5.1 Kesimpulan .....	55
5.2 Saran .....	57
DAFTAR PUSTAKA .....	58
LAMPIRAN .....	60



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berfikir .....	24
Gambar 2. Struktur Organisasi Nagari Sungai Aua .....	42



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Batas Wilayah Nagari Sungai Aua .....	34
Tabel 2. Orbitasi dan Waktu Tempuh .....	34
Tabel 3. Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Domisili Kejorongan .....	35
Tabel 4. Sarana dan Prasarana Nagari Sungai Aua .....	39



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Nagari merupakan nama tradisional dan unit politik dari organisasi sosial-politik minangkabau sejak zaman pra-kolonial, dan Saat ini merupakan lembaga pemerintah terendah di Sumatera Barat. Hal ini merupakan akibat dari kewajiban Pemerintah Sumatera Barat dan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari, bentuk Pemerintahan Nagari sebagai Pemerintahan tingkat terendah (tingkat desa) dan secara efektif berlaku sejak 1 Januari 2001.

Pemerintahan Nagari merupakan bentuk otonomi daerah, yang merupakan pemerintahan tingkat terendah untuk menggantikan pemerintahan desa. Pemerintahan Nagari adalah sistem yang sangat otonom dan berakar di negara ini. Hal ini juga memberikan masyarakat minangkabau pembentukan karakter dan warna yang unik. Pembangunan nagari merupakan bagian integral dan memegang peranan penting karena pada hakikatnya terkait dengan pembangunan daerah dan nasional. Dalam struktur pemerintahan, khususnya di Sumatera Barat, Nagari menempati posisi paling bawah, tetapi berada paling depan dan berada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa segala bentuk program pembangunan pemerintah akan selalu mengarah ke Nagari. (Dwiana, 2018)

Salah satu isi Perda Nomor 10 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Pemerintah Nagari berkewajiban membangun setiap daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen

Pembangunan menyebutkan bahwa pengelolaan pembangunan daerah menjadi tanggung jawab bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). , Pemerintah Nagari dan untuk mencapai kepentingan umum.

Pemerintahan Nagari sudah berkembang jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia. Disini juga berlangsung tatanan demokrasi yang lebih tua daripada di Eropa. Sebelum bangsa Belanda menginjakkan kaki di Indonesia, khususnya di wilayah Minangkabau, nagari merupakan sistem pemerintahan yang berdiri sendiri. Tidak ada pemerintah diatas nagari. Nagari merupakan “republik mini” yang diperintah secara demokratis oleh anak nagari. Dalam pemerintahan nagari, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum diputuskan berdasarkan pada musyawarah mufakat.

Pada masa orde lama, sistem demokrasi Nagari mencapai titik terendah. Ini berawal dari Perintah Eksekutif No. 22 tahun 1946. Berdasarkan SK ini, struktur kelembagaan Nagari terdiri dari Wali Nagari, Dewan Nasional Nagari (DPRN), dan Dewan Harian Nagari. Wari Nagari juga ketua DPRN dan DHN, jadi dia akan menjadi satu-satunya penguasa Nagari. Kemudian, di bawah Ordonansi Gubernur No. 50/GP/1950, Nagari dihapuskan dan diganti oleh pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan kecemasan dan tantangan dari masyarakat dan pemangku adat Niniak Mamak. Rapat Niniak Mamak/Adat di Bukittinggi tahun 1953 memutuskan bahwa pemerintahan Nagari harus dihidupkan kembali. Akibatnya, pemerintahan Nagari dihidupkan kembali dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Februari 1954. Saat itu muncul gerakan untuk menghidupkan



kembali kepadatan kebiasaan Nagari dari masyarakat Nagari. Dan ini dicapai melalui Ordonansi Gubernur No. 15/GSB/1968. KAN kembali dan melakukan tugasnya dalam jangka panjang

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa pada masa Orde Baru, istilah Nagari menghilang dari kehidupan masyarakat Minangkabau. Keberadaan satuan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan desa tidak memperhitungkan status dan keberadaan satuan pemerintahan daerah khusus dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini karena bentuk pemerintahan pasukan khusus pada dasarnya dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum adat seperti Nagari di Minangkabau, pemukiman dan marga di Palembang, huta di Tapanuli dan pemerintahan yang terintegrasi dengan hak-hak tradisionalnya. Sebaliknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B UUD 1945, yaitu negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah tertentu, serta hakikat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Mengakui dan menghormati selama masih hidup dan sesuai. Dengan perkembangan asas masyarakat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ironisnya, arti "hak istimewa" kini berubah. Desa yang sebenarnya dulunya istimewa, tetapi sekarang kepentingannya telah bergeser ke cabang eksekutif murni.. (Rahmad, Mengembalikan Keistimewaan Nagari di Minangkabau Pasca Pemberlakuan Otonomi Daerah, 2015)

Pembangunan ini meliputi pembangunan baik fisik maupun non fisik. Apa yang dimaksud dengan pembangunan yang tampak, seperti pembangunan sekolah, pembangunan jembatan, pengaspalan jalan, pembangunan sistem

irigasi, pembangunan bendungan, dan lain-lain Pembangunan non fisik dipahami sebagai pembangunan yang tidak terlihat, tetapi dapat dilihat manfaatnya, seperti pembangunan ekonomi, agama, dan sosial.

Pembangunan nagari merupakan bagian integral dan memegang peranan penting karena pada hakekatnya terkait dengan pembangunan daerah dan nasional. Secara struktural, Nagari menempati posisi terendah terutama di Sumatera Barat, namun berada paling depan dan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa segala bentuk program pembangunan pemerintah akan selalu mengarah ke Nagari.

Dari jurnal Yofi Elfamedra volume 7 nomor 2 tahun 2018 yang membahas tentang Kepemimpinan Wali Nagari Se-Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan hasil penelitian ini akan menguraikan deskripsi data yang dilihat dari mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan menggerakkan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Wali Nagari di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan belum dilaksanakan dengan baik. Tidak diimplementasikan dengan benar.

Pembangunan tidak dapat dimonopoli secara terpusat oleh negara, tetapi harus diarahkan kepada masyarakat. Perkembangan yang dikemas dengan paradigma dan pedoman pemerintah dan berorientasi pasar terbukti merugikan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan harus berbasis masyarakat (*community based development*). Pembangunan dimulai dari masyarakat, dikelola oleh masyarakat, dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pembangunan menjadi salah satu isu penting yang selalu hangat untuk dibicarakan karena adanya dilema antara memicu pertumbuhan ekonomi atau

mengejar pemerataan pembangunan. Ketimpangan ketersediaan infrastruktur dianggap menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya kesenjangan ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Sehingga perlu dilakukan upaya pembangunan infrastruktur dasar yang mampu menunjang keterjangkauan suatu wilayah untuk memicu pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Menurut pengamatan penulis di Nagari sungai aua, kecamatan Sungai aur Kabupaten Pasaman Barat, pemerataan pembangunan infrastruktur di Nagari Sungai Aua merupakan prioritas utama untuk meningkatkan penghasilan masyarakat, terutama bagi petani, nelayan, pedagang kecil dan lain-lain. seperti pembangunan jalan yang belum secara keseluruhan memadai masih ada di beberapa daerah menuju kebun dan jalan menuju Nagari belum maksimal, lambat dan belum merata dalam pelaksanaannya. Namun hal ini erat kaitannya dengan kemampuan Wali Nagari dalam berorganisasi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji isu “Peranan Wali Nagari dalam pembangunan infrastruktur di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai aur Kabupaten Pasaman Barat”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan Wali Nagari dalam pembangunan infrastruktur di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dalam pembangunan infrastruktur di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan Wali Nagari dalam pembangunan infrastruktur di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dalam pembangunan infrastruktur di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian mengenai Peranan Wali Nagari dalam Pembangunan infrastruktur di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat dan menambah reverensi khususnya bagi para mahasiswa fakultas Ilmu Sosial dan Politik khususnya bagi program studi Ilmu Pemerintahan.
2. Secara praktis, dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait didalam penelitian dan mengukur kemampuan penulis dalam membahas dan mengali data yang berhubungan dengan Peranan Wali Nagari dalam Pembangunan infrastruktur di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengertian Peranan

Menurut David Berry (2003:105), mendefinisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat.

Menurut Vetizal Rivai (2004:148) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu, selanjutnya menurut Ali (2000: 148) peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal peristiwa.

Menurut Mintzberg dalam buku Pengantar Manajemen dan Buku Kepemimpinan Dalam Manajemen yang ditulis oleh Siswanto dan Miftah Thoha (2012:21 dan 12), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1. Peran Antarperibadi (Interpersonal Role), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar. Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan perincian lebih lanjut dari peranan antarpribadi ini. Tiga peranan ini dijelaskan sebagai berikut:

- a. Peranan sebagai tokoh (Figurehead), yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
  - b. Peranan sebagai pemimpin (Leader), dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya pemimpin, memotifasi, mengembangkan, dan mengendalikan.
  - c. Peranan sebagai pejabat perantara (Liaison Manager), disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, 13 dan orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.
2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (Informational Role), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi. Peranan interpersonal diatas Mintzberg merancang peranan kedua yakni yang berhubungan dengan informasi ini. Peranan itu terdiri dari peranan-peranan sebagai berikut:
- a. Peran pemantau (Monitor), peranan ini mengidentifikasi seorang atasan sebagai penerima dan mengumpulkan informasi. Adapun informasi yang diterima oleh atasan ini dapat dikelompokkan atas lima kategori berikut:

1) Internal operations, yakni informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan didalam organisasi, dan semua peristiwa yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.

2) Peristiwa-peristiwa diluar organisasi (external events), informasi jenis ini diterima oleh atasan dari luar organisasi, misalnya informasi dari langganan, hubungan-hubungan pribadi, pesaing- pesaing, asosiasi-asosiasi dan semua informasi mengenai perubahan atau perkembangan ekonomi, politik, dan teknologi, yang semuanya itu amat bermanfaat bagi organisasi.

3) Informasi dari hasil analisis, semua analisis dan laporan mengenai berbagai isu yang berasal dari bermacam-macam sumber sangat bermanfaat bagi atasan untuk diketahui.

4) Buah pikiran dan kecenderungan, atasan memerlukan suatu sasaran untuk mengembangkan suatu pengertian atas kecenderungan-kecenderungan yang tumbuh dalam masyarakat, dan mempelajari tentang ide-ide atau buah pikiran yang baru.

5) Tekanan-tekanan, atasan perlu juga mengetahui informasi yang ditimbulkan dari tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu.

b. Sebagai diseminator, peranan ini melibatkan atasan untuk menagani proses transmisi dari informasi-informasi kedalam organisasi yang dipimpinnya.

c. Sebagai juru bicara (Spokesman), peranan ini dimainkan manajer untuk menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasinya.

3. Peranan Pengambil Keputusan (Decisional Role), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya. Keterlibatan ini disebabkan karena:

a. Secara otoritas formal adalah satu-satunya yang diperbolehkan terlibat untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau yang baru dalam organisasinya.

b. Sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan atas keputusan yang terbaik, yang mencerminkan pengetahuan yang terbaru dan nilai-nilai organisasi.

c. Keputusan-keputusan yang strategis akan lebih mudah diambil secara terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukan kontrol atas semuanya, Siswanto (2012 : 21).

Menurut Miftah Thoha (2007: 263), “suatu peran dirumuskan dalam suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Menurut kamus besar nahasa Indonesia (KBBI) menegaskan bahwa peran adalah bagian utama dari tugas yang harus dilakukan”.

Menurut Lubis dan Husaini (1987: 20), “untuk mengetahui suatu peran digunakan pendekatan intergatif yaitu pendekatan gabungan yang mencakup



input, proses, dan output. Sedangkan menurut Soejono Soekanto (2012: 212) menjelaskan pengertian peran berupa aspek dinamis kedudukan status”.

Ketika orang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, mereka menyatakan perannya. Perbedaan antara jabatan dan peran adalah sains. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada jabatan atau jabatan pekerjaan tanpa jabatan.

Setiap orang memiliki peran yang berbeda-beda yang muncul dari pola kehidupan sosialnya. Ini juga berarti bahwa peran menentukan apa yang dilakukan untuk komunitas dan peluang apa yang ditawarkan komunitas kepadanya.

Peran mencakup dalam tiga hal :

1. Peran meliputi norma-norma yang berkaitan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peran dalam pengertian ini adalah seperangkat aturan yang membimbing orang dalam kehidupan sosial.
2. Peran ialah suatu konsep tentang bagaimana individu berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi.
3. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berkenaan dengan peranan, maka menurut Kozair ( dalam Sitorus, 2006: 134) peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat

stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus dilakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. (Friedman, M, 1998: 286)

Dalam Struktur peran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Peran formal (peran nyata), yaitu serangkaian tindakan yang sejenis. Peran formal standar adalah dalam keluarga. Suami-Ayah dan Istri-Peran dasar yang membentuk status sosial sebagai seorang ibu adalah penyedia, mengurus rumah tangga, pengasuhan, perawatan, persahabatan (mempertahankan hubungan keluarga), terapeutik, seksual.
2. Peran informal (peran tertutup) Ini adalah peran implisit (emosional) yang biasanya tidak muncul ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan menjaga keseimbangan keluarga. Peran informal memiliki persyaratan yang berbeda dan didasarkan pada ciri-ciri kepribadian. Dari keluarga individu. Implementasi peran informal yang efektif dapat memfasilitasi implementasi peran formal

## 2.2 Wali Nagari

Wali Nagari seperti yang disebutkan dalam PERBUP Pasaman Barat Nomor 21 tahun 2019 pasal 1 Wali Nagari adalah pejabat pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Wali Nagari Dipilih langsung oleh warga Nagari, warga negara Republik Indonesia, kemudian diatur secara penuh, proses pemilihannya diatur dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan negara. Kandidat Wali nagari yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Wali nagari dikenal dengan nama Wali nagari. Pemilihan di nagari dalam badan hukum masyarakat dapat disertai dengan hak tradisional seumur hidup, yang keberadaannya berlaku untuk hukum adat setempat dan peraturan yang diatur dalam peraturan daerah dengan peraturan negara.

Pengertian Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat, dengan batas-batas tertentu, aset unik, dan hak untuk mengatur rumah tangga dalam memilih pemimpin pemerintahan.

Sedangkan menurut ahli yang mana Soeroto (2005: 20), mengemukakan bahwasanya Nagari adalah kesatuan keluarga yang lebih besar dari pada suku, Nagari juga biasanya terdiri dari lebih kurang dari 4 suku yaitu keluarga besar setali sedarah dari beberapa paruk menurut garis keturunan ibu.

Pandangan mengenai UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan kaitannya dengan Nagari. Nagari menurut pemerintah Indonesia sama dengan Desa, dengan demikian berikut berupa pandangan UU tentang desa yang berkaitan dengan Nagari di Sumatera Barat.

1. Bahwa dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa terdapat 2(dua) jenis desa, yaitu desa dan desa adat, sesuai dengan pasal 6.
2. Desa dan desa adat mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lainnya.
3. Dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan terdepan ditetapkan desa adat, maka pemerintah provinsi (Sumatera Barat) atau Kabupaten/Kota memilih antara desa atau desa adat, sesuai penjelasan pasal 6 UU No 6 tahun 2014 tentang Desa.
4. Kalau pilihan penyelenggaraan pemerintah terdepan ditetapkan desa adat, maka pemerintah provinsi diharuskan membuat peraturan daerah (Perda), sesuai pasal 109 UU no. 6 tahun 2014 tentang desa.
5. Nagari merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat, bersifat geologis matrilineal dan istoris dengan dengan filsafat adat salingka Nagari.
6. Maka, Nagari dikategorikan sebagai desa adat dan ini adalah suatu keistimewaan yang sudah diakui oleh konstitusi NKRI.

### **2.3 Pembangunan**

Menurut Adi Sasmita Rahardjo (2006) bahwa pembangunan Nagari merupakan seluruh pembangunan yang berlangsung di Nagari dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari berdasarkan kemampuan potensi sumber daya alam (SDA) mereka melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa masyarakat.

Siagian (1998, h,4) mendefinisikan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut H. Sumitro Maskun (1993: 21) bahwa pembangunan Desa adalah pembangunan yang diarahkan kepada masyarakat (*people centered*), mengutamakan segi kehidupan manusia dan mementingkan aspek-aspek humanisme.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa terdapat 3 indikator sebagai pengukur pelaksanaan pembangunan yakni perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan pengawasan. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan pemerintahan Desa adalah penyelenggara roda pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **2.3.1 Program Pembangunan**

Program pembangunan merupakan suatu rencana operasional tahunan yang akan memuat program-program sektoral tertentu yang dimaksud untuk mendukung pencapaian tujuan rencana. Suatu program yang dianggap baik seringkali mempunyai unsur inovatif (pembaharuan), adanya suatu inisiatif baru, pendekatan eksperimental dan aplikasi-aplikasi gagasan baru. Program-program juga dipergunakan untuk memecahkan masalah. Keadaan-keadaan yang merupakan hambatan-hambatan atau kelemahan-kelemahan dalam

masyarakat, sering ditanggulangi dengan suatu program. Memulai suatu program, dapat menarik perhatian dan dukungan dari masyarakat kemudian mengembangkan motivasi dan inisiatif (Tjokroamidjojo, 1971, h. 195-196).

Selain itu menurut Tjoroamidjojo suatu program yang baik harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Tujuan yang dirumuskan cukup jelas.
- b. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
- c. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai program seselektif mungkin.
- d. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut.
- e. Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya. Suatu program pembangunan tidak berdiri.
- f. Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut (Tjokroamidjojo, 1974,h. 195-196).

### **2.3.2 Tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan**

Pembangunan pedesaan pada dasarnya adalah pembangunan desa yang adil, makmur, material, dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu,

dan berdaulat dalam suasana kehidupan berbangsa yang aman, damai, dan dinamis. dari masyarakat modern. Pembangunan masyarakat pedesaan untuk menciptakan kehidupan yang demokratis baik dalam kegiatan dan kegiatan ekonomi, sosial budaya dan politik adalah sejarah hukum dan pluralisme etnis, sosial, budaya dan demokrasi, otonomi, harus didasarkan pada beberapa prinsip dasar partisipasi warga dan kontrol.

Selain itu, tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan desa berbasis keterampilan desa dan potensi sumber daya alam melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan, dan upaya masyarakat. Pembangunan masyarakat pedesaan perlu lebih ditingkatkan, terutama melalui pengembangan sumber daya manusia, termasuk inisiatif masyarakat dan penciptaan iklim yang mendorong swadaya.

Sesuai UU no 25 tahun 2004, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai lima tujuan dan fungsi pokok. Tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

### 2.3.3 Jenis Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan mempunyai berbagai jenis, tergantung dan sifatnya masing-masing. Mengikuti Lincoln Arsyad (2001), menurut jangka waktunya perencanaan pembangunan dapat digolongkan atas tiga jenis yaitu:

a. Perencanaan jangka panjang

Perencanaan jangka panjang biasanya melingkup jangka waktu 10-25 tahun. Rencana jangka panjang biasanya disebut sebagai perencanaan perspektif yang berisikan arah pembangunan secara umum. Dengan kata lain perencanaan jangka panjang berisikan pandangan jauh kedepan tentang kerangka pembangunan. Sedangkan aspek yang dibahas meliputi, bidang ekonomi, sosial budaya, dan tata ruang.

b. Perencanaan jangka menengah

Perencanaan jangka menengah biasanya mencakup waktu 4-5 tahun, tergantung dari masa jabatan atau kepala daerah. Perencanaan jangka menengah berisi perumusan kerangka ekonomi makro, strategi kebijakan dan program pembangunan yang disusun berdasarkan visi dan misi presiden dan kepala daerah terpilih. Disamping itu, perencanaan jangka menengah memuat juga sasaran dan target pembangunan secara kualitatif dan kuantitatif.

c. Perencanaan jangka pendek



Perencanaan jangka pendek mencakup waktu hanya setahun, sehingga sering kali juga dinamakan sebagai rencana tahunan. Rencana ini pada dasarnya adalah merupakan jabaran dari rencana jangka menengah. Disamping itu, perencanaan tahunan ini bersifat sangat operasional karena didalamnya termasuk program dan kegiatan, lengkap dengan pendanaannya, bahkan dalam rencana tahunan ini termasuk indikator dan target kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan.

#### **2.3.4 Strategi pembangunan daerah**

Strategi pembangunan daerah pada dasarnya adalah cara atau kiat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, dengan strategi yang tepat, dapat mencapai tujuan secara akurat dan tepat sasaran, efektif dan efisien mencapai tujuan pembangunan. Strategi pembangunan daerah, dapat dilaksanakan atau tidak, harus dikembangkan dengan mempertimbangkan kondisi kerangka dan kemungkinan daerah yang bersangkutan. Strategi Pengembangan Masyarakat Desa bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan pembangunan seperti promosi pertanian dan industri pedesaan dengan mempromosikan partisipasi warga dan menghubungkannya dengan dukungan pembangunan perkotaan untuk pembangunan pedesaan.

#### **2.3.5 Partisipasi dalam pembangunan pedesaan**

Partisipasi dalam kegiatan publik lokal dianggap bermanfaat. Konsep tentang hal-hal yang berguna itu relatif dan tergantung pada

orang dan kelompok orang yang memiliki konteks sejarah sosial, budaya, dan politiknya masing-masing. Ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi penting.

Pertama, partisipasi masyarakat dilihat sebagai suatu alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, munculnya anggapan bahwa partisipasi merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

## 2.4 Infrastruktur

Fox (2004), mendefinisikan infrastruktur sebagai “ *those services devired from the set of public work traditionally supported by the public sector to enhance private sector production and to allow for household consumption*”.

Mottef (2003), mendefinisikan infrastruktur tidak hanya terbatas pada sudut pandang ekonomi melainkan juga pertahanan dan keberlanjutan pemerintah.

Selanjutnya Vaughn and Pollard (2003), menyatakan infrastruktur secara umum meliputi jalan, jembatan, air dan sistem pembuangan, bandar udara, pelabuhan, bangunan umum, dan juga termasuk sekolah-sekolah, fasilitas kesehatan, penjara, rekreasi, pembangkit listrik, keamanan, kebakaran, tempat pembuangan sampah dan telekomunikasi.

J'afar M. (2007) Menyatakan bahwa, infrastruktur memiliki peranan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan jangka pendek menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi dan jangka menengah dan panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor terkait. Infrastruktur sepertinya menjadi jawaban dari kebutuhan negara-negara yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan membantu penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, mendukung tumbuhnya pusat ekonomi dan meningkatkan mobilitas barang dan jasa serta merendahkan biaya aktifitas investor dalam dan luar negeri. Problemnnya, pembangunan infrastruktur dasar membutuhkan modal besar, yang sering tidak selalu diikuti oleh loncatan perolehan nilai tambahnya (*value added*). Daerah-daerah terperinci yang dinilai tidak memiliki potensi ekonomi dan sosial budaya yang memadai cenderung ditelantarkan (Hermanto, *et al.*1995). Terutama jika dikaitkan dengan kriteria-kriteria yang ditentukan pemerintah seperti jumlah penduduk, nilai ekonomi yang akan segera kembali dari investasi yang ditanamkan dan lain-lain. Seperti yang dinyatakan oleh Kasiyanto (1996) , bahwa jumlah penduduk di wilayah-wilayah terisolasi dikota sangat sedikit sehingga pemerintahan rugi besar kalau mengalokasikan dana besar untuk pembangunan jalan, sebaiknya alokasi dana desa tersebut diarahkan ke kebutuhan lain yang lebih mendesak untuk peningkatan taraf hidup masyarakat. Sebenarnya pemikiran ini sangat benar dan tepat, tetapi sayangnya hanya menolong masyarakat untuk jangka pendek dan hal ini tidak menolong masyarakat untuk mandiri. Namun pemerintahan juga perlu menyiapkan infrastruktur yang akan mendorong peningkatan taraf hidup

masyarakat dalam jangka panjang melalui akses ke pasar bagi masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu para pengambil keputusan di tingkat pusat jangan berpandangan myopic (jangka pendek). Alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur di daerah-daerah seperti ini mungkin lebih sering dipandang sebagai beban dan bukan sebagai bentuk investasi bangsa.

#### **2.4.1 Sistem Infrastruktur**

Sistem infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur dasar, peralatan, fasilitas yang dibangun dan diperlukan untuk berfungsinya sistem sosial dan ekonomi masyarakat. (Grigg, 2000). Sistem infrastruktur merupakan pemain utama dalam sistem sosial dan ekonomi dalam kebutuhan masyarakat.

Peran infrastruktur sebagai perantara antara sistem ekonomi dan sosial dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan alam sangat penting. Infrastruktur non-fungsional memiliki dampak besar pada manusia. Di sisi lain, infrastruktur yang terlalu besar untuk kesejahteraan manusia tanpa mempertimbangkan daya dukung berbahaya bagi alam, yang pada dasarnya berbahaya bagi manusia, termasuk organisme lain.

#### **2.4.2 Perancangan Sistem Infrastruktur**

Tahap investigasi, perencanaan, pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan merupakan proses yang perlu dilakukan untuk menciptakan sistem infrastruktur yang terintegrasi dan komprehensif.

Salah satu tantangan utama dalam merancang sistem infrastruktur

adalah untuk mempertimbangkan bagaimana mereka semua saling mempengaruhi, keterkaitan dan efeknya (Grigg, 1988) dalam keseimbangan yang harmonis.

Untuk suksesnya perancangan sistem infrastruktur yang bersifat menyeluruh tahapan dibawah ini dapat dipakai sebagai salah satu acuan yang meliputi (Grigg, 1988) :

1. Perencanaan menyeluruh yang komprehensif
2. Rencana induk untuk setiap pembangunan dan pengembangan sistem
3. Perkiraan biaya
4. Perencanaan organisasi dan institusi
5. Perencanaan untuk peningkatan sistem yang ada

### **2.4.3 Krisis Infrastruktur**

Krisis infrastruktur juga dapat diartikan sebagai situasi atau kondisi yang merupakan titik balik yang dapat meningkatkan atau menurunkan infrastruktur tergantung pada respon individu, kelompok, komunitas, atau nasional. Menurut Grigg dari Kodoatie (2003), penyebab krisis infrastruktur adalah:

1. Kegagalan pembuatan (modal, desain, konstruksi/teknologi)
2. Runtuh (ambruk, teknologi)
3. Rusak/aus (umur, pemakaian, salah pakai)
4. Bencana alam (banjir, gempa, kebakaran)
5. Tidak ada penambahan/penyesuaian (kapasitas kurang)
6. Tidak ada/minim pemeliharaan

Adapun penyebab kesalahan manajemen yakni :

1. Pemotongan anggaran/investasi kurang
2. Kesalahan pemilihan infrastruktur
3. Pemakaian melewati umur/*life-cycle* tidak diperhatikan
4. Kecenderungan mengabaikan pemeliharaan
5. Mahalnya teknologi baru
6. Mahalnya pemeliharaan
7. Teknologi kurang berkembang

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan, selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan. Maka dalam kajian pustaka ini penelitian mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu seperti :

1. Harja Wardoyo dalam skripsinya yang berjudul “Peran Lembaga Nagari Dalam Meningkatkan Pembangunan di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat”. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini , peneliti membahas tentang pembangunan yang terjadi di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Hasil penelitian ini yaitu Pembangunan Nagari Ujung Gading berdasarkan teori pembangunan Tjahja Supriatna memang tidak sesempurna teori, tetapi sangat penting karena sesuai dengan apa yang terjadi di daerah ini, namun kekurangannya tidak mempengaruhi kepuasan masyarakat. Pembangunan Nagari Ujung Gading bertujuan untuk

mempercepat pembangunan infrastruktur sehingga masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

2. Septiana Nur Utami dalam skripsinya yang berjudul “ Peranan Kepala Desa Sebagai Motivator Pembangunan Desa”. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang mengenai peranan Kepala Desa Ngancar sebagai motivator dalam menggerakkan swadaya masyarakat dalam rangka pembangunan fisik di Desa Ngancar Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiru. Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang (1) Dalam konteks pembangunan fisik desa Ngancar, peran kepala desa Ngancar sebagai motif penggerak kemandirian masyarakat tetap terjaga dengan baik dengan berbagai kegiatan komunikasi yang dilakukan dan pembangunan fisik yang bermanfaat bagi masyarakat. (2) proses dan strategi komunikasi yang dilakukan Kepala Desa Ngancar berhasil mendorong partisipasi masyarakat dan (3) partisipasi masyarakat Desa Ngancar diwujudkan dalam berbagai bentuk swadaya, yaitu swadaya ide, dana, tenaga, dan material pembangunan

## 2.6 kerangka berfikir

Suriasumantri 1986, dalam (Sugiyono, 2010) mengemukakan bahwa seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan.

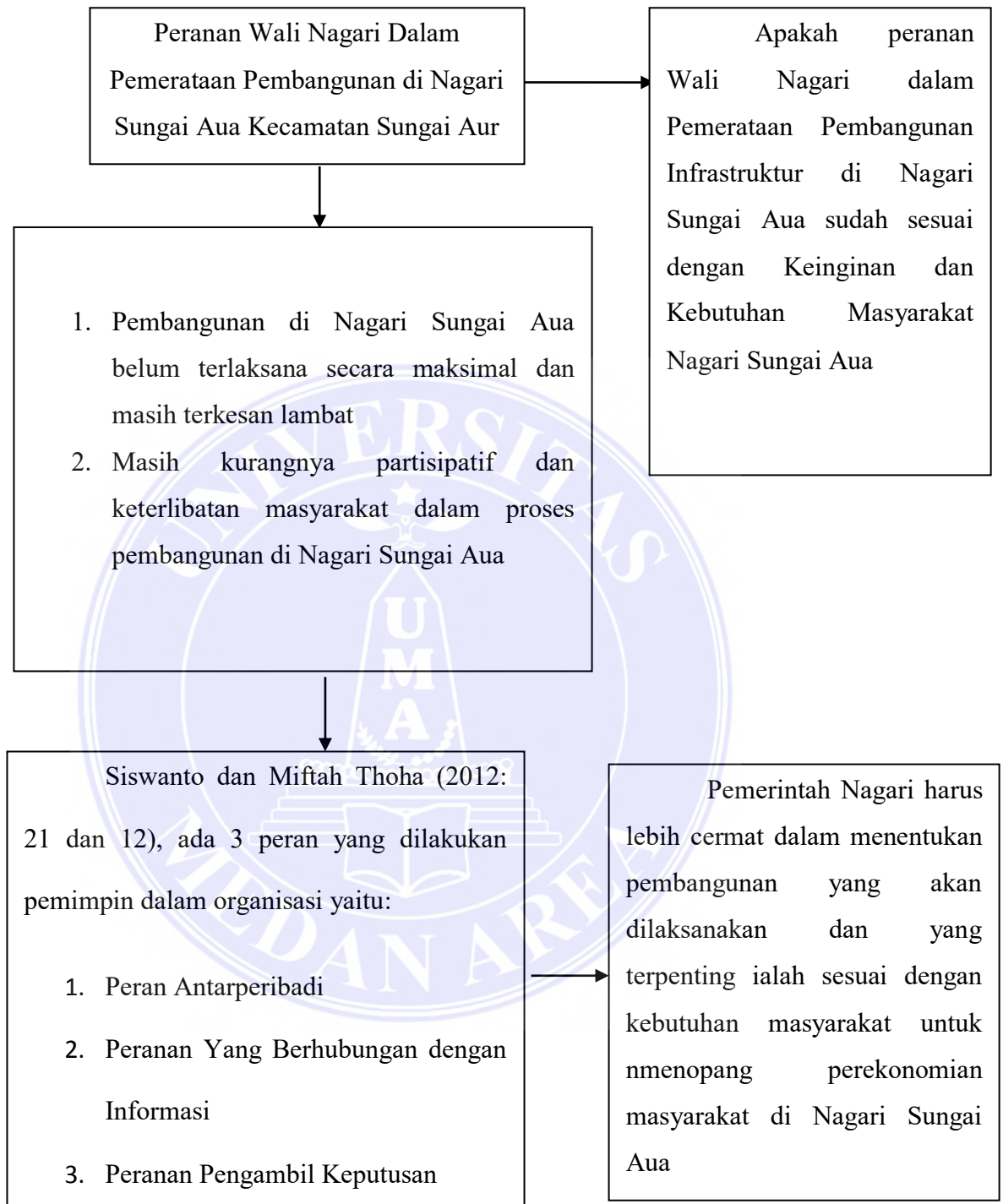
Kriteria utama kerangka berpikir untuk membujuk sesama ilmuwan adalah alur berpikir logis dalam mengkonstruksi cara berpikir yang menarik

kesimpulan berupa hipotesis. Oleh karena itu, kerangka berpikir mengintegrasikan hubungan antar variabel dan dirangkum dari berbagai teori yang dijelaskan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis (Sugiyono,2010:60-61)





Gambar 1. Kerangka Berpikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Menurut Nazir dalam Andi Prastowo (2011:186), metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011:60), penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individual maupun kelompok. Sedangkan metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy L. Moleong (2011:4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data yang dihasilkan berupa kata-kata, gambar serta perilaku manusia.

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dengan judul “Peranan Wali Nagari Dalam Pemerataan Pembangunan di Nagari Sungai Aua” dilaksanakan di kantor Wali Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

### 3.3 Waktu Penelitian

No	Waktu Kegiatan	Mar-2021	Apr-2021	Mei-2021	Juni-2021	Juli-2021	Agst-2021	Sept-2021	Okt-2021
1	Penyusunan Proposal	■							
2	Seminar Proposal		■						
3	Perbaikan Proposal			■					
4	Pengambilan data riset			■					
5	Penyusunan Skripsi				■	■			
6	Bimbingan Seminar Hasil						■		
7	Seminar Hasil								
8	Bimbingan Skripsi								
9	Skripsi								

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikut akan dijelaskan urutannya dari masing-masing teknik pengumpulan data, yaitu:

#### 1. Observasi

Menurut Hasan (2002: 86), observasi ialah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.

Sedangkan menurut Riduwan (2010: 30), observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku dan

tindakan manusia, fenomena alam, proses kerja, dan penggunaan responden kecil. Teknik pengumpulan data dengan observasi lebih efektif dengan menggunakan cara mengamati dan mencatat langsung dilokasi dengan gejala-gejala yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti. Kegiatan observasi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan di Nagari Sungai Aua.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan tujuan pengumpulan informasi. Wawancara menurut ahli Andi Prastowo (2011:212) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, wawancara dilakukan secara tersusun menurut uraian pertanyaan penelitian, dimana wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Wali Nagari Sungai Aua selaku kepala pemerintahan di Nagari dalam pengelolaan pemerataan pembangunan di Nagari.

## 3. Dokumentasi

Menurut Djam'an Satori dan Aan Komariah (2011: 149), adalah mengumpulkan dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan

penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan dan dokumen di lokasi penelitian dan sumber informasi lain yang berkaitan dengan subjek penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa buku, jurnal, dan laporan dari para profesional yang berkompeten yang memiliki petunjuk tentang masalah yang akan diteliti.

### 3.5 Informan penelitian

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, “teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu” (Sugiyono, 2010:300).

Informan (sumber penelitian) adalah orang yang memiliki informasi tentang subjek penelitian. Informan survei ini berasal dari wawancara tatap muka yang dikenal sebagai narasumber. Dalam penelitian ini, informan diidentifikasi dengan menggunakan teknik penargetan yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu agar peneliti benar-benar mempelajari objek yang dipelajarinya.

1. Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi yang luas tentang masalah yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci tidak hanya mengetahui situasi dan fenomena masyarakat secara umum, tetapi juga memahami informasi tentang informan kunci. Pilihan informan utama tergantung pada unit dianalisis. Misalnya pada unit sebuah organisasi, informan kuncinya adalah pimpinan

organisasi tersebut. Informan kunci sebaiknya orang yang bersedia berbagi konsep dan pengetahuan dengan peneliti, dan sering dijadikan tempat bertanya oleh peneliti. Untuk itu sebaiknya dalam pengumpulan data peneliti sebaiknya memulainya dari informan kunci untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang masalah yang diamati. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah bapak Yonri Hasman SE selaku Pj Wali Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.

2. Informan utama pada penelitian kualitatif mirip dengan aktor utama dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Adapun informan utama pada penelitian ini adalah bapak Yulhandri S.pd selaku sekretaris Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.
3. Informan tambahan merupakan sumber yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan kunci dan informan utama. Adapun informan tambahan pada penelitian ini adalah bapak Namlis Lubis selaku masyarakat Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.

### 3.6 Analisis Data

Menurut *Miles & Huberman* (1992:16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut ;

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data akan terus berlanjut selama proyek berorientasi penelitian kualitatif sedang berlangsung. Harapan reduksi data menjadi jelas ketika peneliti (sering tanpa menyadarinya) memutuskan kerangka konseptual untuk bidang studi mereka, masalah penelitian, dan pendekatan pengumpulan data pilihan mereka. Selama pengumpulan data, tingkat reduksi berikut terjadi (ringkasan, pengkodean, pencarian topik, pengelompokan, partisi, pembuatan catatan). Reduksi/transformasi data ini dilanjutkan setelah penelitian lapangan hingga dihasilkan laporan akhir yang lengkap.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengklasifikasikan, memanipulasi, membuang, dan menata data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir dan divalidasi. Dalam hal reduksi data, peneliti tidak perlu menafsirkannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan diubah dalam berbagai cara, termasuk seleksi ketat, ringkasan atau deskripsi singkat, dan klasifikasi

ke dalam pola yang lebih luas. Dimungkinkan untuk mengubah data menjadi angka dan peringkat, tetapi itu tidak selalu masuk akal.

## 2. Penyajian Data

*Miles & Huberman* membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan cara ini, analis dapat melihat apa yang terjadi dan mengikuti saran yang mungkin berguna dalam presentasi untuk memutuskan apakah akan menarik kesimpulan yang benar atau melanjutkan analisis.

## 3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut *Miles & Huberman* hanyalah sebagai dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Tinjauan dapat bersifat ringkas, seperti pemikiran ulang analisis, tinjauan catatan lapangan, atau tinjauan dan brainstorming antara rekan kerja untuk menciptakan konsensus antar-subjektif, atau Kami juga dapat melakukan upaya ekstensif untuk menempatkan salinan temuan. Dengan kumpulan data lainnya. Singkatnya, implikasi yang muncul dari data lain perlu diuji akurasi, kekokohan, dan



kesesuaiannya, yaitu validitasnya. Kesimpulan akhir perlu divalidasi untuk pertimbangan praktis, tidak hanya selama proses akuisisi data.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan dan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Kantor Wali Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa peranan Wali Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur dalam pembangunan infrastruktur berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa, terdapat 3 indikator sebagai pengukur pelaksanaan pembangunan yakni perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan, Dapat diketahui bahwa: (1) Perencanaan bahwa untuk merencanakan pembangunan Nagari diperlukan musyawarah Nagari ditingkat jorong dan musyawarah pembangunan (MUSBANG) Nagari. Musbang Nagari yang pada akhirnya dikenal dengan musyawarah rencana pembangunan (MUSRENBANG) Nagari adalah salah satu implikasi dari pendekatan pembangunan partisipatif. Pendekatan pembangunan partisipatif memberikan kesempatan untuk menyatakan masalah yang dihadapi dan gagasan-gagasan sebagai masukan untuk berlangsungnya proses perencanaan berdasarkan kemampuan masyarakat itu sendiri. Masyarakat diberi hak untuk terlibat secara demokratis dalam ikut menentukan berbagai hal yang menyangkut kehidupannya. (2) Pelaksanaan yaitu peranan kepala Wali Nagari dalam pembangunan infrastruktur jalan di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat dalam proses penetapan pelaksanaan

pembangunan dilakukan oleh Wali Nagari berdasarkan peraturan dan pedoman yang ada, dan proses penetapan tersebut Wali Nagari memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan pelaksanaan pembangunan di Nagari Sungai Aua, sedangkan masyarakat tidak paham mengenai proses penetapan pelaksana pembangunan di karenakan tidak dilibatkan dalam proses tersebut. (3) Pengawasan dan Pemantauan yaitu bahwa pengawasan dan pemantauan yang dilakukan pemerintah sudah merasa melakukan yang terbaik dalam memberikan pemntauan dan pengawasan dan pemerintah Nagari tidak menutup akses masyarakat untuk melakukan pengawan dan pemantauan dalam proses pembangunan, namun untuk masyarakat sendiri masih banyak yang apatis dalam proses pengawasan pelaksanaan pembangunan di Nagari Sungai Aua.

2. Faktor pendukung lainnya adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata “participation”. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang membangkitkan emosi dan ikut serta atau ikut serta dalam kegiatan organisasi. Berkenaan dengan kebutuhan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara aktif, dan partisipasi dapat berarti partisipasi untuk menentukan arah strategi kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional individu atau individu dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk berkontribusi pada tujuan kelompok.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dalam penelitian pada kantor Wali Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur maka penulis memberikan saran – saran sebagai berikut :

1. Bagi Wali Nagari dalam pembangunan infrastruktur di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.

Peranan Wali Nagari dalam pembangunan infrastruktur di Nagari Sungai Aua diharapkan lebih ditingkatkan dari sebelumnya supaya memperoleh hasil yang maksimal terhadap pembangunan dan juga Wali Nagari Sungai Aua harus lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Nagari Sungai Aua.

2. Bagi masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat agar lebih aktif dalam dalam pelaksanaan pembangunan di Nagari Sungai Aua baik dalam menyampaikan aspirasi maupun pengawasan terhadap kebijakan pemerintah Nagari Sungai Aua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sasmita Rahardjo, *Membangun Desa Partisipatif*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, Jakarta, 1987.
- Hermanto. Et al. 1995. *Kemiskinan di Pedesaan: Masalah dan Alternatif Penanggulangannya*. Prosiding Pengembangan Hasil Penelitian, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian, Bogor.
- Kasiyanto.M.J. 1996. *Masalah dan Strategi Pembangunan Indonesia*. PT. Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara Jakarta. Cetakan ke-1 Kwan, Eunkyung. 2001. *Infrastructure, Growth and Poverty Reduction In Indonesia: A Crossectional Analysis*. Asian Development Bank Institute.
- Lubis Hari.S.B dan Martani Husaini, *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*, Jakarta, 1997.
- Marwan J'afar 2007 *Infrastruktur Pro Rakyat, Strategi Investasi Infrastruktur Indonesia Abad 21*. Pustaka Toko Bangsa
- Maskun, H. Sumitro, 1993, *Pembangunan Masyarakat Desa: Asa, Kebijakan, dan Manajemen*. Yogyakarta, PT. Media Widya Mandala
- Siagian, Sondang P. (1998). *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sitorus, M. 2006. *SOSIOLOGI 2*. Gelora Aksara, Jakarta
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Thoha Miftah, *pemimpin dan kepemimpinan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (1974) *Pengantar Administrasi Pembangunan* Jakarta, LP3ES

Sumber lain:

Undang-Undang No. 6 tahun 2014. Tentang desa.

Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 21 Tahun 2019. Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2014. Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Elfamedra Yofi, 2018. *Kepemimpinan Wali Nagari Sekecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Selatan*. Volume 7 Nomor 2. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*

Putri Dwiana, 2015. *Peranan Pemerintahan Nagari Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kenagarian Guguak VII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota*. Volume 2 No 1.



## LAMPIRAN



**Foto Kantor Wali Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat**



**Foto Bersama Wali Nagari Sungai Aua**



Foto Bersama Sekretaris Sungai Aua



Foto Bersama Warga Nagari Sungai Aua